



Pedagogi Kritis Peter McLaren dan Ketimpangan Digital dalam Pendidikan Masyarakat Majemuk Indonesia

Mohamat Harianton^{1*}, Ahsan Hakim²

¹ Institut Ahmad Dahlan Probolinggo

Email: Hariantonm@gmail.com

² Institut Ahmad Dahlan Probolinggo

Email: ahsanhakim1988@gmail.com

*Korespondensi: email: Hariantonm@gmail.com

ABSTRAK

History Artikel: *Transformasi digital dalam pendidikan Indonesia menghadirkan peluang perluasan akses pembelajaran, tetapi pada saat yang sama memperlihatkan ketimpangan dalam akses teknologi, kapasitas digital, kualitas pemanfaatan pengetahuan, dan representasi sosial-budaya. Kondisi tersebut menjadi persoalan penting dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, khususnya bagi Pendidikan Agama Islam yang berhadapan dengan perubahan pola produksi dan distribusi pengetahuan di ruang digital. Penelitian ini bertujuan menganalisis ketimpangan digital dalam pendidikan Indonesia melalui perspektif pedagogi kritis Peter McLaren serta merumuskan arah pendidikan digital yang lebih adil, inklusif, dan emansipatoris. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan dan analisis dokumen melalui sintesis kritis terhadap literatur mengenai ketimpangan digital, pendidikan digital, pendidikan multikultural, literasi digital, dan Pendidikan Agama Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan digital bersifat multidimensional dan tidak berhenti pada persoalan kepemilikan perangkat atau konektivitas, tetapi mencakup kemampuan menggunakan teknologi, kualitas akses terhadap pengetahuan, kapasitas institusi pendidikan, serta representasi keragaman sosial dan budaya. Perspektif McLaren memperlihatkan bahwa digitalisasi pendidikan dapat mereproduksi ketimpangan melalui relasi kuasa dan distribusi pengetahuan yang tidak setara, tetapi juga dapat menjadi ruang resistensi dan transformasi apabila peserta didik ditempatkan sebagai subjek kritis. Penelitian ini menegaskan bahwa pendidikan digital yang berkeadilan memerlukan pergeseran dari pemerataan akses menuju keadilan digital, dari konsumsi informasi menuju produksi pengetahuan.*

Diterima 01 Oktober 2026
Direvisi 10 Oktober 2026
Diterima 11 Oktober 2026
Tersedia online 26 Oktober 2026

Kata kunci:

Pedagogi kritis; Keadilan digital; Literasi digital kritis; Pendidikan multikultural; Pendidikan Agama Islam

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah menjadi bagian penting dari perkembangan pendidikan Indonesia, tetapi perluasan teknologi pendidikan belum dengan sendirinya menghasilkan pemerataan kesempatan belajar. Pandemi COVID-19 memperlihatkan secara nyata bahwa pembelajaran berbasis digital berlangsung dalam kondisi sosial, ekonomi, geografis, dan kelembagaan yang tidak setara. Studi (Pratiwi & Utama, 2020), misalnya, menunjukkan bahwa pelaksanaan belajar dari rumah di Indonesia memiliki variasi yang sangat lebar antara wilayah 3T dan non-3T, mulai dari penggunaan kelas virtual hingga berhentinya proses pembelajaran, yang berimplikasi terhadap kesenjangan kualitas layanan pendidikan. Ketimpangan tersebut tidak berhenti pada persoalan kepemilikan perangkat dan koneksi internet, tetapi berkaitan pula dengan kemampuan menggunakan teknologi, kualitas penggunaan, dukungan keluarga, kesiapan sekolah, dan kapasitas guru. Temuan mengenai hubungan antara infrastruktur TIK dan ketimpangan pendidikan di Indonesia juga memperlihatkan bahwa akses internet, komputer, telepon seluler, serta infrastruktur pendukung berhubungan dengan distribusi kesempatan pendidikan (Fadhila Rahma et al., 2024). Dalam perspektif yang lebih kritis, digitalisasi pendidikan perlu dipahami bukan sebagai proses teknologi yang netral, melainkan sebagai proses sosial yang berlangsung dalam struktur masyarakat yang tidak setara. Pemikiran McLaren menempatkan pendidikan dalam relasi kekuasaan, produksi pengetahuan, budaya, dan reproduksi sosial; bahkan dalam konteks pendidikan digital, (McLaren & Jandrić, 2020) menegaskan pentingnya membaca kondisi postdigital secara kritis agar teknologi tidak diterima sekadar sebagai instrumen kemajuan. Dengan demikian, ketimpangan digital dalam pendidikan Indonesia penting dikaji sebagai persoalan keadilan pendidikan, terutama dalam masyarakat yang ditandai keragaman kelas sosial, wilayah, budaya, bahasa, dan identitas keagamaan.

Penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa ketimpangan digital dalam pendidikan merupakan fenomena multidimensional. Pada tingkat internasional, (van de Werfhorst et al., 2022) menunjukkan bahwa ketimpangan kesiapan digital tidak hanya berbeda antarindividu, tetapi juga antar sekolah dan berkaitan dengan latar belakang sosial peserta didik. (González-Betancor et al., 2021) bahkan membedakan ketimpangan digital berdasarkan akses, frekuensi penggunaan, dan kualitas penggunaan teknologi, serta menunjukkan bahwa status sosial-ekonomi keluarga dan integrasi TIK di sekolah berpengaruh terhadap dimensi-dimensi tersebut. Sementara itu, penelitian di Indonesia menunjukkan pola yang sejalan. (Makolo et al., 2026) menemukan bahwa digitalisasi pendidikan pascapandemi masih dipengaruhi oleh status sosial-ekonomi, lokasi geografis, kelas sosial, literasi digital, modal pendidikan keluarga, dan kapasitas kelembagaan. (Nurul et al., 2026) juga menunjukkan bahwa transformasi pendidikan digital di Indonesia dapat mereproduksi ketimpangan sosial pada dimensi regional, sosial-ekonomi, dan kelembagaan. Bahkan penelitian mengenai pendidikan di wilayah Ternate memperlihatkan bahwa ketimpangan perangkat, konektivitas, dan literasi digital berkaitan dengan persoalan inklusi sosial dan keterbatasan integrasi konten lokal. Pada sisi lain, kajian mengenai pendidikan multikultural Indonesia menegaskan bahwa kemajemukan budaya, agama, bahasa, dan wilayah membutuhkan kebijakan serta praktik pendidikan yang sensitif terhadap perbedaan (Mariyono, 2024). Kecenderungan penelitian tersebut menunjukkan bahwa kajian ketimpangan digital telah bergerak dari persoalan akses menuju persoalan penggunaan, kualitas pembelajaran, kapasitas institusi, inklusi sosial, dan keadilan pendidikan.

Meskipun demikian, masih terdapat celah konseptual yang penting. Sebagian penelitian mengenai ketimpangan digital di Indonesia lebih banyak menggunakan pendekatan struktural, ekonomi, kebijakan publik, statistik pendidikan, atau perspektif kesenjangan akses, sementara

kajian mengenai pedagogi kritis lebih sering digunakan untuk membahas kekuasaan, ideologi, budaya, kurikulum, dan emansipasi tanpa secara spesifik menghubungkannya dengan ketimpangan digital pendidikan Indonesia. Padahal, McLaren menempatkan pendidikan sebagai ruang sosial yang tidak terpisah dari relasi kekuasaan dan produksi pengetahuan. Dalam buku *Life in Schools*, ia secara eksplisit membahas hubungan pedagogi kritis dengan konstruksi sosial pengetahuan, relasi power/knowledge, kurikulum, reproduksi sosial, ras, kelas, gender, teknologiisasi pembelajaran, pengalaman peserta didik, serta posisi guru sebagai agen sosial dan moral (*Life in Schools: An Introduction to Critical Pedagogy in the Foundations of ...* - Peter McLaren - Google Buku, n.d.). Perspektif tersebut memungkinkan ketimpangan digital dibaca lebih jauh daripada persoalan siapa yang memiliki perangkat atau akses internet. Pertanyaan kritisnya bergeser menjadi bagaimana struktur sosial menentukan siapa yang memperoleh manfaat teknologi, pengetahuan dan budaya siapa yang memperoleh legitimasi dalam ruang digital, bagaimana teknologi dapat mereproduksi ketimpangan yang telah ada, serta sejauh mana pendidikan dapat menjadi ruang resistensi dan transformasi. (Jandrić & McLaren, 2021) menegaskan bahwa pedagogi kritis perlu terus direkonseptualisasi untuk menghadapi perubahan teknologi dan kondisi postdigital, sehingga teknologi harus ditempatkan sebagai bagian dari persoalan sosial dan politik, bukan sekadar instrumen pedagogis. Celah inilah yang belum cukup dikembangkan dalam kajian ketimpangan digital pendidikan Indonesia, khususnya ketika persoalan tersebut ditempatkan dalam konteks masyarakat yang majemuk.

Berdasarkan celah tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi pedagogi kritis Peter McLaren dengan kajian ketimpangan digital dalam konteks pendidikan masyarakat majemuk Indonesia. Penelitian ini tidak menempatkan ketimpangan digital semata-mata sebagai kesenjangan infrastruktur, tetapi mengonstruksinya sebagai persoalan relasi kuasa, reproduksi sosial, budaya, produksi pengetahuan, dan keadilan pendidikan. Kerangka tersebut memungkinkan analisis bergerak dari first-level digital divide berupa akses perangkat dan konektivitas menuju persoalan yang lebih substantif, seperti kemampuan menggunakan teknologi, kualitas partisipasi dalam pembelajaran, representasi budaya, serta distribusi manfaat pendidikan digital. Perluasan perspektif ini sejalan dengan kajian mengenai ketimpangan digital yang menunjukkan bahwa kesenjangan teknologi memiliki dimensi sosial dan kultural yang melampaui akses semata (Kuhn et al., 2023). Kebaruan lainnya terletak pada penempatan kemajemukan Indonesia sebagai konteks analitis: ketimpangan digital dipahami bersamaan dengan perbedaan geografis, sosial-ekonomi, budaya, dan kapasitas kelembagaan sehingga keadilan digital tidak hanya berarti pemerataan akses, tetapi juga kesempatan untuk berpartisipasi dan memperoleh manfaat pendidikan secara bermakna. Posisi ini memperoleh dukungan dari (McLaren & Jandrić, 2020) yang menghubungkan pedagogi kritis dengan kondisi postdigital dan teknologi informasi serta menekankan perlunya kesadaran kritis dalam menghadapi perubahan teknologi. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan konstruksi konseptual bahwa ketimpangan digital merupakan salah satu bentuk reproduksi ketidakadilan pendidikan yang dapat dianalisis sekaligus ditantang melalui pedagogi kritis.

Atas dasar argumentasi tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis ketimpangan digital dalam pendidikan Indonesia melalui perspektif pedagogi kritis Peter McLaren dengan mempertimbangkan karakter masyarakat Indonesia yang majemuk. Secara khusus, penelitian diarahkan untuk memahami bagaimana relasi kekuasaan, kondisi sosial-ekonomi, budaya, dan struktur kelembagaan membentuk pengalaman serta kesempatan peserta didik dalam pendidikan digital; bagaimana ketimpangan akses, penggunaan, dan manfaat teknologi pendidikan dimaknai dalam konteks masyarakat yang beragam; serta bagaimana prinsip

pedagogi kritis dapat memberikan arah bagi pendidikan digital yang lebih adil, inklusif, dan emansipatoris. Berdasarkan tujuan tersebut, pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai berikut: (1) bagaimana konsep pedagogi kritis Peter McLaren menjelaskan hubungan antara pendidikan, kekuasaan, budaya, dan reproduksi ketimpangan; (2) bagaimana ketimpangan digital dikonstruksi dan dialami dalam praktik pendidikan pada masyarakat Indonesia yang majemuk; dan (3) bagaimana pedagogi kritis Peter McLaren dapat digunakan untuk merumuskan pemaknaan pendidikan digital yang lebih berkeadilan dan emansipatoris? Pertanyaan tersebut menempatkan penelitian pada orientasi kualitatif-interpretatif, dengan perhatian pada proses, makna, pengalaman, praktik, dan konstruksi sosial yang membentuk ketimpangan digital, bukan semata-mata pada pengukuran kuantitatif tingkat akses teknologi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (*qualitative literature research*) yang dipadukan dengan analisis dokumen dan pendekatan kritis-interpretatif. Desain ini dipilih karena penelitian tidak diarahkan untuk menguji hubungan antarvariabel, mengukur besaran pengaruh, ataupun menghasilkan generalisasi statistik, melainkan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai konstruksi ketimpangan digital dalam pendidikan Indonesia melalui perspektif pedagogi kritis Peter McLaren. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memahami fenomena melalui interpretasi terhadap makna, konteks, proses, dan konstruksi sosial yang terkandung dalam data, termasuk data berbentuk teks dan dokumen (Aspers & Corte, 2019). Dalam studi kepustakaan, literatur dapat diperlakukan sebagai sumber data yang dianalisis dan disintesis secara sistematis untuk membangun pemahaman baru terhadap suatu persoalan akademik (Snyder, 2019). Dengan demikian, penelitian ini tidak berhenti pada pemaparan hasil penelitian terdahulu, tetapi melakukan pembacaan kritis terhadap hubungan antara digitalisasi pendidikan, ketimpangan sosial, kekuasaan, budaya, produksi pengetahuan, dan keadilan pendidikan.

Konteks penelitian berada pada ruang literatur akademik yang berkaitan dengan pedagogi kritis Peter McLaren, pendidikan digital, ketimpangan digital, keadilan pendidikan, dan masyarakat majemuk Indonesia. Sumber data diperoleh melalui penelusuran literatur pada Google Scholar, Scopus, Web of Science, Garuda, serta laman jurnal akademik yang relevan. Sumber yang dianalisis mencakup artikel jurnal ilmiah, karya akademik Peter McLaren, buku atau bab buku teoritis yang relevan, hasil penelitian mengenai pendidikan digital dan ketimpangan pendidikan di Indonesia, serta dokumen kebijakan yang berkaitan dengan transformasi digital pendidikan. Pemanfaatan dokumen sebagai data penelitian memiliki dasar metodologis yang kuat karena dokumen dapat digunakan untuk memperoleh, membandingkan, dan menafsirkan pengetahuan mengenai fenomena sosial yang diteliti (Bowen, 2009). Literatur tidak diposisikan sekadar sebagai referensi pendukung, tetapi sebagai korpus data yang menjadi dasar pembentukan kategori, tema, interpretasi, dan argumentasi penelitian. Karena itu, penelitian ini tidak memiliki informan manusia; unit analisisnya adalah teks, argumentasi, konsep, temuan empiris, dan konstruksi makna yang terdapat dalam literatur terpilih, sedangkan objek penelitian adalah ketimpangan digital dalam pendidikan Indonesia yang dianalisis melalui perspektif pedagogi kritis Peter McLaren.

Pemilihan literatur dilakukan secara *purposive*, berdasarkan relevansi, kedalaman informasi, kredibilitas sumber, dan kesesuaiannya dengan fokus penelitian. Literatur empiris terutama diprioritaskan pada publikasi tujuh tahun terakhir untuk menangkap perkembangan mutakhir mengenai digitalisasi dan ketimpangan pendidikan, sedangkan karya primer Peter

McLaren tidak dibatasi tahun publikasinya karena digunakan sebagai sumber teoritis utama. Literatur dipertimbangkan untuk dimasukkan apabila membahas pedagogi kritis, pemikiran McLaren, ketimpangan atau kesenjangan digital, pendidikan digital, keadilan pendidikan, reproduksi sosial, budaya dan ideologi pendidikan, atau konteks masyarakat majemuk Indonesia. Literatur yang hanya membahas aspek teknis penggunaan teknologi pendidikan tanpa relevansi dengan ketimpangan, kekuasaan, keadilan, atau konteks sosial pendidikan tidak dijadikan sumber utama. Strategi pemilihan secara purposive relevan dalam penelitian berbasis sintesis kualitatif karena memungkinkan peneliti memusatkan analisis pada sumber yang paling kaya dan relevan dengan pertanyaan penelitian (Ames et al., 2019).

Pengumpulan data dilakukan melalui tahapan penelusuran, identifikasi, seleksi, pembacaan kritis, pencatatan, dan ekstraksi data literatur. Penelusuran dilakukan menggunakan kombinasi kata kunci berbahasa Indonesia dan Inggris, seperti Peter McLaren, critical pedagogy, digital inequality, digital divide, digital education, educational inequality, educational justice, multicultural education, dan Indonesia. Setiap literatur yang ditemukan diperiksa berdasarkan judul, abstrak, kata kunci, relevansi substansi, kredibilitas penerbit, dan keterlacakan bibliografinya. Literatur yang memenuhi kriteria kemudian dibaca secara menyeluruh dan dicatat dalam matriks telaah literatur yang memuat identitas sumber, fokus penelitian, kerangka teori, konteks, metode, temuan utama, bentuk ketimpangan digital, serta relevansinya dengan pemikiran McLaren. Instrumen penelitian berupa pedoman telaah dokumen, matriks ekstraksi data, dan pedoman pengodean tematik yang disusun peneliti. Prosedur dokumentasi semacam ini penting agar proses pengumpulan dan interpretasi dokumen berlangsung terarah dan dapat ditelusuri kembali (Bowen, 2009).

Analisis data dilakukan secara tematik-kritis melalui proses kondensasi data, pengodean, kategorisasi, pemetaan hubungan antartema, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Tema awal diarahkan pada aspek akses digital, kesiapan digital, ketimpangan sosial, kekuasaan, budaya, ideologi, produksi pengetahuan, reproduksi sosial, resistensi, keadilan, dan emansipasi. Analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi pola makna dalam korpus literatur secara sistematis (Kiger & Varpio, 2020). Selanjutnya, tema-tema tersebut dibaca menggunakan kerangka pedagogi kritis Peter McLaren untuk menjelaskan bagaimana ketimpangan digital dapat berfungsi sebagai mekanisme reproduksi ketidakadilan sekaligus membuka ruang bagi praktik pendidikan yang lebih kritis dan emansipatoris. Sintesis dilakukan secara interpretatif dengan mempertemukan temuan yang sejalan maupun bertentangan, sehingga hasil penelitian tidak sekadar berupa rangkuman literatur, tetapi menghasilkan argumentasi konseptual mengenai arah pendidikan digital yang lebih adil dalam masyarakat Indonesia yang majemuk. Pendekatan sintesis kualitatif memungkinkan berbagai temuan literatur diintegrasikan untuk menghasilkan pemahaman yang lebih kaya mengenai fenomena yang kompleks (Flemming & Noyes, 2021).

Keabsahan penelitian dijaga melalui triangulasi sumber, keterlacakan proses analisis, konsistensi interpretasi, dan reflektivitas peneliti. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan karya primer McLaren, artikel jurnal nasional dan internasional, penelitian empiris mengenai pendidikan digital Indonesia, serta dokumen kebijakan yang relevan. Keabsahan tidak dipahami sebagai pengujian statistik, tetapi sebagai upaya memastikan bahwa argumentasi penelitian memiliki dasar literatur yang memadai, konsisten, transparan, dan dapat ditelusuri. Kualitas penelitian kualitatif sangat berkaitan dengan ketepatan desain, keterkaitan antara pertanyaan dan metode, transparansi proses analisis, serta kesadaran peneliti terhadap posisi interpretatifnya (Johnson et al., 2020). Reflektivitas diterapkan dengan melakukan pemeriksaan ulang terhadap proses pemilihan sumber, pengodean, pembentukan tema, dan

interpretasi agar peneliti tidak hanya memilih bukti yang mendukung perspektif McLaren (Barrett et al., 2020). Etika penelitian diterapkan dengan mencantumkan seluruh sumber secara akurat, memberikan atribusi terhadap gagasan dan temuan penulis sebelumnya, menghindari plagiarisme dan manipulasi kutipan, serta membedakan secara eksplisit antara argumentasi asli sumber dan interpretasi yang dikembangkan peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan kualitatif dengan menganalisis dan mensintesis artikel jurnal yang relevan dengan ketimpangan digital, pendidikan Indonesia, pendidikan multikultural, literasi digital, dan Pendidikan Agama Islam (PAI). Literatur dipilih secara purposif berdasarkan relevansi terhadap fokus penelitian, dengan prioritas publikasi lima tahun terakhir. Karena penelitian tidak melibatkan wawancara atau observasi lapangan, istilah **informan** tidak digunakan dan tidak terdapat kutipan wawancara. Unit data penelitian berupa temuan, argumentasi, dan bukti empiris yang dilaporkan dalam literatur. Sintesis terhadap korpus literatur menunjukkan empat tema utama yang saling berhubungan, yaitu ketimpangan akses, ketimpangan kapasitas dan kualitas penggunaan, dimensi sosial-kultural, serta arah pendidikan digital yang berkeadilan dan emansipatoris.

A. Ketimpangan Digital Berakar pada Ketidakmerataan Akses dan Infrastruktur Pendidikan

Tema pertama menunjukkan bahwa ketimpangan digital dalam pendidikan Indonesia masih berkaitan erat dengan ketidakmerataan infrastruktur, perangkat, jaringan internet, dan kemampuan sekolah menyediakan lingkungan belajar digital. Studi (Fadhila Rahma et al., 2024), yang menganalisis data 34 provinsi Indonesia selama 2015–2021, menunjukkan bahwa infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi memiliki keterkaitan signifikan dengan ketimpangan pendidikan. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa digitalisasi tidak berlangsung dalam ruang sosial yang seragam. Perbedaan kondisi antarwilayah menyebabkan kemampuan peserta didik untuk memperoleh manfaat dari teknologi pendidikan juga berbeda.

Temuan tersebut diperkuat oleh penelitian (Hidayah, 2022) mengenai pembelajaran daring di Indonesia yang memperlihatkan bahwa kesenjangan tidak hanya berupa kepemilikan perangkat dan akses internet, tetapi juga berkaitan dengan kontrol terhadap perangkat, keterampilan teknologi, serta tingkat partisipasi peserta didik. Dengan demikian, keberadaan teknologi di lingkungan pendidikan belum dengan sendirinya menghasilkan kesempatan belajar yang setara. Temuan yang lebih mutakhir juga menunjukkan bahwa transformasi pendidikan digital dapat mereproduksi ketimpangan sosial apabila kebijakan digitalisasi tidak mempertimbangkan perbedaan kondisi regional, sosial-ekonomi, dan kapasitas kelembagaan (Nurul et al., 2026).

B. Ketimpangan Digital Melampaui Kepemilikan Perangkat

Tema kedua menunjukkan bahwa persoalan digital dalam pendidikan tidak berhenti pada pertanyaan apakah peserta didik memiliki telepon pintar, komputer, atau koneksi internet. Ketimpangan juga muncul pada kualitas penggunaan, keterampilan digital, intensitas pemanfaatan, serta kemampuan mengubah teknologi menjadi sumber daya akademik. (González-Betancor et al., 2021) menunjukkan bahwa kesenjangan digital bersifat multidimensional, mencakup akses, frekuensi penggunaan, dan kualitas penggunaan. Posisi sosial-ekonomi keluarga berpengaruh terhadap akses, sedangkan lingkungan sekolah dapat berperan sebagai agen kompensasi melalui penyediaan fasilitas dan integrasi teknologi dalam

pembelajaran.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian (Halim & Hidayat, 2025) terhadap mahasiswa Indonesia yang menunjukkan bahwa kesenjangan digital berlangsung secara bertingkat, dari akses menuju keterampilan, penggunaan, dan hasil pendidikan. Artinya, peserta didik yang sama-sama terkoneksi dengan internet belum tentu memiliki kemampuan yang sama dalam mencari, mengevaluasi, memproduksi, dan menggunakan informasi untuk kepentingan akademik. Dalam konteks PAI, persoalan ini menjadi semakin penting karena penggunaan teknologi tidak hanya berkaitan dengan efisiensi pembelajaran, tetapi juga dengan kemampuan peserta didik menilai informasi keagamaan secara kritis dan bertanggung jawab.

Pada tingkat praktik pendidikan Islam, kesenjangan tersebut terlihat dalam keterbatasan kompetensi digital pendidik dan belum meratanya integrasi teknologi dalam pembelajaran PAI. (Mintasih et al., 2024) menunjukkan bahwa kompetensi guru menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan integrasi teknologi PAI, termasuk dalam konteks pendidikan di wilayah yang memiliki keterbatasan tertentu. Penelitian (Reksiana et al., 2024) juga menempatkan penguatan kompetensi literasi digital guru PAI sebagai kebutuhan penting dalam menghadapi pembelajaran digital.

C. Kemajemukan Sosial dan Budaya Membentuk Pengalaman Pendidikan Digital

Tema ketiga memperlihatkan bahwa ketimpangan digital dalam pendidikan Indonesia berkelindan dengan kondisi masyarakat yang plural. Perbedaan geografis, sosial-ekonomi, budaya, bahasa, dan latar belakang peserta didik memengaruhi bagaimana teknologi digunakan dan dimaknai dalam proses pendidikan. (Mariyono, 2024) menunjukkan bahwa pendidikan multikultural di Indonesia masih menghadapi persoalan ketidakmerataan sumber daya, kesiapan pendidik, serta kebutuhan terhadap materi pembelajaran yang lebih merepresentasikan keragaman budaya Indonesia. Pada saat yang sama, teknologi digital memiliki potensi memperluas interaksi lintas wilayah dan budaya apabila akses serta konten pembelajaran tersedia secara inklusif.

Temuan lain menunjukkan bahwa teknologi digital dapat digunakan untuk mendukung pembelajaran yang menghargai keberagaman. (Hasanah et al., 2021), misalnya, menemukan bahwa bahan ajar digital berorientasi pendidikan multikultural efektif dalam meningkatkan sikap pluralis peserta didik. Namun, literatur juga menunjukkan bahwa manfaat tersebut tidak otomatis muncul dari penggunaan teknologi. Kesenjangan akses, kualitas konten, literasi digital, dan kemampuan guru tetap menjadi faktor pembatas. Karena itu, digitalisasi pendidikan dalam masyarakat majemuk membutuhkan perhatian terhadap siapa yang dapat mengakses teknologi, pengetahuan apa yang disebarkan melalui teknologi, serta kelompok mana yang memperoleh ruang untuk berpartisipasi dalam produksi pengetahuan.

D. Arah Pendidikan Digital: Dari Digitalisasi Menuju Keadilan, Inklusivitas, dan Pemberdayaan

Sintesis keseluruhan literatur menunjukkan bahwa arah pendidikan digital yang lebih adil tidak cukup diwujudkan melalui peningkatan penggunaan teknologi. Pendidikan digital membutuhkan pemerataan akses sekaligus penguatan kompetensi guru, literasi peserta didik, kualitas konten, dan sensitivitas terhadap konteks sosial-budaya. Dalam PAI, kebutuhan tersebut semakin terlihat karena digitalisasi pembelajaran perlu berjalan bersama penguatan nilai, etika, kemampuan berpikir kritis, dan tanggung jawab dalam menggunakan informasi keagamaan.

(Hamirudin, 2023) secara khusus menemukan bahwa kesenjangan pembelajaran PAI pada era digital berkaitan dengan keterbatasan akses teknologi, kemampuan digital pendidik

dan peserta didik, serta ketidakmerataan sumber daya digital. Sementara itu, penelitian (Arifah et al., 2024) menunjukkan bahwa media digital dapat meningkatkan aksesibilitas, fleksibilitas, kualitas pembelajaran, dan potensi peserta didik, tetapi ketimpangan akses, peran guru, serta kualitas media tetap menjadi hambatan. Penelitian terbaru mengenai literasi digital PAI juga menunjukkan pentingnya integrasi kemampuan teknis dengan kemampuan berpikir kritis dan kesadaran etis dalam menggunakan informasi digital (Fatah et al., 2026).

Dengan demikian, temuan penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan digital merupakan persoalan struktural yang mencakup akses, kapasitas penggunaan, kualitas pengetahuan, dan representasi sosial-budaya. Arah pendidikan digital yang muncul dari sintesis literatur bukan sekadar memperbanyak perangkat atau memindahkan pembelajaran ke platform digital, melainkan membangun ekosistem pendidikan yang memungkinkan peserta didik dari latar belakang berbeda memperoleh akses, mengembangkan kapasitas kritis, berpartisipasi dalam produksi pengetahuan, dan memperoleh manfaat teknologi secara lebih setara. Temuan inilah yang selanjutnya menjadi dasar untuk mendiskusikan relevansi perspektif pedagogi kritis Peter McLaren dalam merumuskan pendidikan digital yang lebih adil, inklusif, dan emansipatoris.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan digital dalam pendidikan Indonesia tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan keterbatasan perangkat dan jaringan internet. Ketimpangan berlangsung secara berlapis, mulai dari akses terhadap infrastruktur, kemampuan menggunakan teknologi, kualitas pemanfaatan teknologi untuk belajar, hingga kesempatan peserta didik untuk berpartisipasi dalam produksi pengetahuan. Temuan tersebut menjadi penting ketika dibaca melalui perspektif pedagogi kritis Peter McLaren, karena teknologi pendidikan pada dasarnya tidak bersifat netral. Teknologi berada dalam relasi sosial yang dipengaruhi oleh distribusi kekuasaan, kepentingan ekonomi, produksi pengetahuan, dan struktur budaya. Dengan demikian, pertanyaan utama penelitian ini bagaimana perspektif McLaren menawarkan arah pendidikan digital yang lebih adil, inklusif, dan emansipatoris tidak cukup dijawab dengan agenda pemerataan akses, tetapi membutuhkan perubahan cara pendidikan memahami relasi antara teknologi, pengetahuan, dan kekuasaan.

A. Ketimpangan Digital sebagai Persoalan Kekuasaan dan Reproduksi Sosial

Temuan mengenai ketidakmerataan infrastruktur digital memperlihatkan bahwa digitalisasi pendidikan dapat menjadi instrumen reproduksi ketimpangan apabila kondisi sosial yang tidak setara hanya dipindahkan ke ruang digital. (Fadhila Rahma et al., 2024), misalnya, menunjukkan adanya hubungan antara infrastruktur TIK dan ketimpangan pendidikan di Indonesia. Temuan tersebut diperkuat oleh (Nurul et al., 2026), yang menunjukkan bahwa transformasi pendidikan digital di Indonesia belum secara otomatis menghasilkan pemerataan, bahkan dapat mereproduksi ketimpangan berdasarkan dimensi regional, sosial-ekonomi, dan kelembagaan.

Dalam perspektif McLaren, persoalan tersebut dapat dipahami sebagai persoalan relasi kuasa dalam pendidikan. Pedagogi kritis tidak melihat sekolah hanya sebagai ruang transmisi pengetahuan, melainkan sebagai arena tempat kepentingan sosial, ideologi, dan hubungan kekuasaan dinegosiasikan. Karena itu, ketika akses terhadap teknologi, kualitas koneksi, perangkat, dan sumber belajar digital lebih mudah diperoleh kelompok tertentu, teknologi berpotensi memperkuat struktur sosial yang telah timpang. Digitalisasi yang secara administratif tampak modern belum tentu bersifat demokratis secara pedagogis.

Temuan ini memperluas pemahaman tentang digital divide. (González-Betancor et al., 2021) menunjukkan bahwa kesenjangan digital bersifat multidimensional, meliputi akses, frekuensi penggunaan, dan kualitas penggunaan. Menariknya, penelitian tersebut menemukan bahwa latar belakang sosial-ekonomi keluarga sangat berpengaruh terhadap akses, sedangkan integrasi TIK di sekolah lebih berpengaruh terhadap frekuensi dan kualitas penggunaan. Dengan kata lain, sekolah memiliki peluang untuk berfungsi sebagai institusi kompensatoris terhadap ketimpangan yang dibawa peserta didik dari lingkungan keluarga.

Di sinilah perspektif McLaren memberikan perluasan penting. Sekolah tidak cukup diposisikan sebagai penyedia perangkat, tetapi sebagai ruang untuk menginterupsi reproduksi ketimpangan. Pendidikan digital yang kritis harus memungkinkan peserta didik memahami mengapa sebagian kelompok memiliki akses dan kemampuan digital yang lebih besar daripada kelompok lainnya. Kesadaran semacam ini penting dalam PAI karena pendidikan tidak hanya berorientasi pada penguasaan materi keagamaan, tetapi juga pembentukan peserta didik yang mampu membaca realitas sosial secara kritis dan bertanggung jawab.

B. Dari Literasi Digital Instrumental Menuju Literasi Digital Kritis

Temuan penelitian mengenai kesenjangan kualitas penggunaan teknologi menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan digital tidak dapat diukur hanya berdasarkan kemampuan guru dan peserta didik mengoperasikan aplikasi. Penelitian (van de Werfhorst et al., 2022) menemukan adanya perbedaan sosial-ekonomi yang kuat dalam keterampilan digital peserta didik, sementara tingkat kesiapan digital sekolah juga berbeda-beda. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa kepemilikan perangkat tidak identik dengan kemampuan memanfaatkan teknologi untuk memperoleh pengetahuan yang bermakna.

Dalam konteks PAI, persoalan ini menjadi semakin kompleks. Peserta didik kini memperoleh pengetahuan keagamaan melalui berbagai platform digital yang tidak semuanya memiliki standar akademik, pedagogis, atau otoritas keilmuan yang sama. Karena itu, literasi digital dalam PAI seharusnya tidak direduksi menjadi kemampuan mencari materi, membuat presentasi, atau menggunakan aplikasi pembelajaran. Literasi digital perlu mencakup kemampuan mengevaluasi sumber, mengenali bias, memeriksa otoritas pengetahuan, membedakan argumentasi keagamaan dan opini personal, serta memahami konsekuensi etis dari penyebaran informasi.

Arah tersebut sejalan dengan perkembangan literatur PAI. (Reksiana et al., 2024) menunjukkan pentingnya penguatan kompetensi literasi digital guru PAI dalam menghadapi pembelajaran digital. (Mintasih et al., 2024), melalui penelitian mengenai integrasi teknologi digital dalam pembelajaran PAI, juga menempatkan kompetensi guru sebagai salah satu unsur penting dalam keberhasilan integrasi teknologi. Temuan tersebut memperkuat hasil penelitian ini, tetapi perspektif McLaren membawa persoalan tersebut lebih jauh: guru tidak hanya perlu kompeten menggunakan teknologi, tetapi juga perlu memiliki kesadaran kritis mengenai kekuasaan yang bekerja melalui teknologi dan pengetahuan digital.

Dengan demikian, kontribusi penelitian ini terletak pada pergeseran konseptual dari digital literacy sebagai kompetensi teknis menuju critical digital literacy sebagai kemampuan pedagogis dan sosial. Guru PAI tidak cukup menjadi pengguna platform digital, melainkan fasilitator yang membantu peserta didik membaca, mempertanyakan, mengevaluasi, dan memproduksi pengetahuan secara kritis. Dalam kerangka ini, teknologi menjadi medium dialogis, bukan sekadar instrumen untuk mempercepat penyampaian materi.

C. Pendidikan Digital dalam Masyarakat Majemuk: Antara Inklusivitas dan Dominasi Pengetahuan

Dimensi kemajemukan Indonesia memperlihatkan bahwa ketimpangan digital juga

merupakan persoalan representasi budaya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa teknologi dapat memperluas akses terhadap pengetahuan lintas budaya, tetapi sekaligus dapat memperkuat dominasi narasi tertentu apabila konten digital tidak merepresentasikan keragaman pengalaman peserta didik. (Hasanah et al., 2021) menunjukkan bahwa bahan ajar digital yang berorientasi pada pendidikan multikultural dapat mendukung berkembangnya sikap pluralis peserta didik. Sebaliknya, literatur mengenai pendidikan multikultural di era digital menunjukkan bahwa kesenjangan akses, kualitas konten, dan kemampuan pengguna tetap menjadi tantangan dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif (Salsabila et al., 2022).

Temuan tersebut memperkuat posisi McLaren bahwa budaya merupakan bagian penting dari praktik pedagogis. Pendidikan tidak berlangsung dalam ruang budaya yang kosong. Apa yang dianggap sebagai pengetahuan yang sah, siapa yang diberi ruang untuk berbicara, dan perspektif siapa yang dianggap penting merupakan persoalan pedagogis sekaligus politis. Dalam konteks PAI, implikasinya adalah materi digital keagamaan perlu dikembangkan dengan memperhatikan keberagaman sosial dan budaya peserta didik Indonesia, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam.

Hal tersebut sekaligus menghindarkan penelitian ini dari pandangan teknologi yang terlalu optimistik. Teknologi memang dapat memperluas akses dan mempertemukan kelompok yang berbeda, tetapi teknologi tidak dengan sendirinya menghasilkan toleransi atau keadilan. Teknologi hanya menyediakan kemungkinan pedagogis; hasil akhirnya sangat bergantung pada bagaimana guru, sekolah, kurikulum, dan peserta didik menggunakannya. Dengan demikian, pendidikan digital yang inklusif harus mempertanyakan bukan hanya “apakah peserta didik memiliki akses?”, tetapi juga “pengetahuan siapa yang hadir dalam ruang digital, nilai apa yang dibawa, dan siapa yang memiliki kesempatan untuk memproduksi pengetahuan?”

D. Guru PAI sebagai Intelektual Kritis dalam Ruang Digital

Perspektif McLaren memberikan konsekuensi penting terhadap posisi guru. Guru tidak semestinya ditempatkan hanya sebagai operator teknologi atau penyampai materi digital. Dalam pedagogi kritis, guru memiliki fungsi sebagai intelektual yang terlibat dalam pembentukan kesadaran peserta didik dan transformasi sosial. Pemikiran McLaren bersama Jandrić menegaskan bahwa pedagogi kritis harus mengambil teknologi secara serius karena kondisi postdigital telah mengubah cara pengetahuan, informasi, dan kekuasaan beroperasi.

Dalam konteks PAI, gagasan tersebut memiliki relevansi khusus. Guru PAI berada pada posisi strategis untuk menghubungkan literasi digital dengan nilai keagamaan, etika, keadilan sosial, dan tanggung jawab kewargaan. Penelitian (Hyangsewu et al., 2024), misalnya, menunjukkan bahwa guru PAI mengembangkan literasi digital untuk memperkuat interaksi keagamaan dan membangun digital citizenship. Sementara itu, (Reksiana et al., 2024) menunjukkan pentingnya sinergi guru PAI dalam membangun budaya literasi dan penelitian dengan menghubungkan ilmu agama, teknologi, dan ilmu sosial.

Namun demikian, temuan tersebut perlu dikritisi. Peningkatan kompetensi digital guru belum otomatis menghasilkan pedagogi kritis. Seorang guru dapat menguasai berbagai platform digital tetapi tetap menerapkan pola pembelajaran satu arah, menjadikan peserta didik konsumen informasi, dan tidak memberi ruang bagi dialog atau kritik. Karena itu, ukuran keberhasilan transformasi digital PAI tidak semestinya berhenti pada jumlah guru yang mengikuti pelatihan teknologi, tetapi perlu melihat apakah teknologi tersebut menghasilkan partisipasi, dialog, refleksi kritis, dan kemampuan peserta didik memproduksi pengetahuan.

E. Menuju Pendidikan Digital yang Emansipatoris

Kontribusi utama penelitian ini adalah merumuskan bahwa pendidikan digital yang

berkeadilan dalam perspektif McLaren perlu bergerak melalui tiga transformasi yang saling berkaitan: dari akses menuju keadilan, dari konsumsi menuju produksi pengetahuan, dan dari kompetensi teknis menuju kesadaran kritis. Transformasi pertama berarti pemerataan perangkat, konektivitas, dan dukungan kelembagaan. Transformasi kedua menempatkan peserta didik bukan sebagai konsumen konten digital, tetapi sebagai subjek yang mampu menghasilkan pengetahuan berdasarkan pengalaman sosial dan budayanya. Transformasi ketiga menempatkan literasi digital sebagai kemampuan memahami relasi kuasa, bias, ideologi, dan konsekuensi sosial teknologi.

Argumen tersebut memiliki kedekatan dengan konsep digital critical pedagogy. (Carius & Scartoni, 2023) menunjukkan bahwa praktik pendidikan digital yang tidak memperhitungkan kondisi kelompok sosial tertentu dapat memperluas ketimpangan, sehingga pedagogi kritis diperlukan untuk mengarahkan digitalisasi menuju ekuitas digital. Demikian pula, (Ortaçtepe Hart, 2023) menekankan pentingnya ruang digital yang anti-opresif untuk mengurangi relasi kuasa yang timpang, membangun komunitas belajar, dan mengakomodasi keragaman.

Dengan demikian, penelitian ini tidak menempatkan teknologi sebagai penyebab tunggal ketimpangan, tetapi sebagai arena tempat ketimpangan dapat direproduksi sekaligus dilawan. Di sinilah letak kontribusi teoritis penelitian terhadap kajian PAI: pedagogi kritis McLaren dapat digunakan untuk memperluas diskursus pendidikan digital Islam dari persoalan “kesiapan teknologi” menuju persoalan keadilan pengetahuan, agensi peserta didik, representasi budaya, dan transformasi relasi pedagogis. Pendidikan digital yang emansipatoris bukan pendidikan yang paling banyak menggunakan teknologi, melainkan pendidikan yang menggunakan teknologi untuk memperluas kemampuan peserta didik membaca realitas, mempertanyakan ketidakadilan, menyuarakan pengalaman kelompok yang terpinggirkan, dan berpartisipasi dalam perubahan sosial.

Pada akhirnya, temuan penelitian memperlihatkan bahwa keadilan digital dalam pendidikan Indonesia membutuhkan intervensi pada dua level sekaligus. Pada level struktural, negara dan lembaga pendidikan perlu memastikan pemerataan infrastruktur, akses, sumber belajar, dan pengembangan kompetensi guru. Pada level pedagogis, guru PAI perlu mengubah teknologi dari sekadar perangkat pembelajaran menjadi ruang dialog, refleksi, produksi pengetahuan, dan pembentukan kesadaran kritis. Posisi ini sekaligus menunjukkan batas pendekatan digitalisasi yang terlalu teknokratis: tanpa perubahan relasi pedagogis dan struktur kesempatan belajar, digitalisasi hanya berpotensi membuat ketimpangan lama tampil dalam bentuk yang baru.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketimpangan digital dalam pendidikan Indonesia bukan semata-mata persoalan keterbatasan akses teknologi, melainkan persoalan struktural yang mencakup distribusi sumber daya, kapasitas digital, kualitas produksi dan penggunaan pengetahuan, serta representasi sosial-budaya. Perspektif pedagogi kritis Peter McLaren menunjukkan bahwa digitalisasi pendidikan dapat mereproduksi ketimpangan ketika teknologi diposisikan sebagai instrumen teknis yang netral, tetapi sekaligus dapat menjadi ruang resistensi dan transformasi ketika peserta didik ditempatkan sebagai subjek kritis dalam proses produksi pengetahuan. Dengan demikian, arah pendidikan digital yang lebih adil, inklusif, dan emansipatoris mensyaratkan pergeseran dari pemerataan akses menuju keadilan digital, dari konsumsi informasi menuju produksi pengetahuan, serta dari literasi teknis menuju literasi digital kritis.

Kebaruan penelitian ini terletak pada operasionalisasi pedagogi kritis McLaren sebagai

kerangka untuk membaca ketimpangan digital dalam konteks pendidikan masyarakat majemuk Indonesia, khususnya PAI. Kerangka tersebut mempertemukan dimensi akses, kekuasaan, pengetahuan, budaya, dan agensi peserta didik dalam satu konstruksi analitis. Kontribusinya adalah memperluas kajian PAI dari orientasi digitalisasi pembelajaran menuju agenda keadilan pengetahuan dan pedagogi digital transformatif, sekaligus memberikan dasar bagi pengembangan pembelajaran yang dialogis, kritis, inklusif, dan sensitif terhadap keragaman sosial-budaya.

Keterbatasan penelitian terletak pada penggunaan studi kepustakaan sehingga temuan belum menguji secara langsung pengalaman guru dan peserta didik pada konteks sekolah yang berbeda. Penelitian selanjutnya perlu melakukan studi empiris pada wilayah dan satuan pendidikan yang beragam untuk menguji kerangka pedagogi digital kritis yang dihasilkan, termasuk melalui penelitian tindakan atau studi multi-kasus yang melibatkan guru PAI dan peserta didik sebagai subjek aktif.

SARAN

Penelitian selanjutnya disarankan menguji kerangka pedagogi digital kritis yang dirumuskan melalui studi empiris pada satuan pendidikan dengan karakteristik wilayah, sosial-ekonomi, dan budaya yang berbeda. Studi tersebut dapat melibatkan guru Pendidikan Agama Islam dan peserta didik melalui studi multi-kasus atau penelitian tindakan untuk melihat bagaimana literasi digital kritis, dialog, produksi pengetahuan, dan representasi budaya diterapkan dalam pembelajaran. Pada tingkat kebijakan, lembaga pendidikan perlu memperhatikan pemerataan infrastruktur sekaligus penguatan kompetensi digital kritis guru agar digitalisasi tidak hanya memperluas penggunaan teknologi, tetapi juga memperkuat keadilan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ames, H., Glenton, C., & Lewin, S. (2019). Purposive sampling in a qualitative evidence synthesis: a worked example from a synthesis on parental perceptions of vaccination communication. *BMC Medical Research Methodology*, 19(1). <https://doi.org/10.1186/S12874-019-0665-4>
- Arifah, M. N., Saputra, K. D., & Baharuddin, A. Z. (2024). Engaging Opportunities and Challenges: Students' Perspectives Towards Developing Islamic Education Learning Media. *Edukasia : Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 19(2), undefined-undefined. <https://doi.org/10.21043/EDUKASIA.V19I2.28482>
- Aspers, P., & Corte, U. (2019). What is Qualitative in Qualitative Research. *Qualitative Sociology*, 42(2), 139–160. <https://doi.org/10.1007/S11133-019-9413-7>
- Barrett, A., Kajamaa, A., & Johnston, J. (2020). How to ... be reflexive when conducting qualitative research. *The Clinical Teacher*, 17(1), 9–12. <https://doi.org/10.1111/TCT.13133>
- Bowen, G. A. (2009). Document Analysis as a Qualitative Research Method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Carius, A., & Scartoni, F. R. (2023). Digital Critical Pedagogy: Describing Paths to Digital Equity. *Global Journal of Information Technology Emerging Technologies*, 13(2), 100–112. <https://doi.org/10.18844/GJIT.V13I2.9123>
- Fadhila Rahma, S., Kartiasih, F., Kota, B., & Penuh, S. (2024). Pengaruh Infrastruktur Transportasi serta Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) terhadap Ketimpangan

Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 13(2), 153–170. <https://doi.org/10.52813/JEI.V13I2.453>

Fatah, H. H., Hakim1, L., Hilmy, M., Islam, U., Sunan, N., & Surabaya, A. (2026). DIGITAL LITERACY AND ISLAMIC EDUCATION IN INDONESIA: EXAMINING POLICY, LEARNING PRACTICES, AND TEACHER READINESS. *Geneologi PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 13(1). <https://doi.org/10.32678/GENELOGIPAI.V13I1.12938>

Flemming, K., & Noyes, J. (2021). Qualitative Evidence Synthesis: Where Are We at? *International Journal of Qualitative Methods*, 20. <https://doi.org/10.1177/1609406921993276;REQUESTEDJOURNAL:JOURNAL:IJQA;WEBSITE:WEBSITE:SAGE;WGROU:STRING:PUBLICATION>

González-Betancor, S. M., López-Puig, A. J., & Cardenal, M. E. (2021). Digital inequality at home. The school as compensatory agent. *Computers & Education*, 168, 104195. <https://doi.org/10.1016/J.COMPEDU.2021.104195>

Halim, U., & Hidayat, N. (2025). The Sequential Levels of the Digital Divide in the Educational Domain Among Indonesian University Students. *INJECT (Interdisciplinary Journal of Communication)*, 10(1), 179–208. <https://doi.org/10.18326/INJECT.V10I1.4427>

Hamirudin. (2023). The Learning Gap in Islamic Religious Education in the Digital Era. *Al-Iltizam: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 8(2), 208–217. <https://doi.org/10.33477/alt.v8i2.7847>

Hasanah, U., Marini, A., & Maksum, A. (2021). Multi-cultural education-oriented digital teaching materials to improve students' pluralist attitudes. *Jurnal Prima Edukasia*, 9(1), 118–126. <https://doi.org/10.21831/jpe.v9i1.35503>

Hidayah, S. (2022). Online Learning During the Pandemic in Indonesia: A Case Study on Digital Divide and Sociality Among Students. *A Journal of the Faculty of Cultural Sciences, Universitas Gadjah Mada, Indonesia.*, 34(2). <https://doi.org/10.22146/jh.72605>

Hyangsewu, P., Abdullah, H. T., Faqihuddin, A., Muflih, A., & Sari, I. (2024). IJECA International Journal of Education & Curriculum Application IRE Teachers' Efforts to Improve Digital Literacy to Strengthen Religious Interaction towards a Good Digital Citizenship Society. *IJECA (International Journal of Education and Curriculum Application)*, 7(3). <https://doi.org/10.31764/ijeca.v7i3.26737>

Jandrić, P., & McLaren, P. (2021). Critical intellectuals in postdigital times. *Policy Futures in Education*, 19(6), 626–639. <https://doi.org/10.1177/1478210320964372;ISSUE:ISSUE:DOI>

Johnson, J. L., Adkins, D., & Chauvin, S. (2020). A Review of the Quality Indicators of Rigor in Qualitative Research. *American Journal of Pharmaceutical Education*, 84(1), 7120. <https://doi.org/10.5688/AJPE7120>

Kiger, M. E., & Varpio, L. (2020). Thematic analysis of qualitative data: AMEE Guide No. 131. *Medical Teacher*, 42(8), 846–854. <https://doi.org/10.1080/0142159X.2020.1755030>

Kuhn, C., Khoo, S. M., Czerniewicz, L., Lilley, W., Bute, S., Crean, A., Abegglen, S., Burns, T., Sinfield, S., Jandrić, P., Knox, J., & MacKenzie, A. (2023). Understanding Digital Inequality: A Theoretical Kaleidoscope. *Postdigital Science and Education* 2023 5:3, 5(3), 894–932. <https://doi.org/10.1007/S42438-023-00395-8>

Life in Schools: An Introduction to Critical Pedagogy in the Foundations of ... - Peter McLaren - Google Buku. (n.d.). Retrieved October 6, 2026, from [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=YR7vCgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=McLaren,+P.+\(2015\).+*Life+in+schools:+An+introduction+to+critical+pedagogy+in+the+foundations+of+education*+\(6th+ed.\).+Routledge.&ots=yyEtmW3Xym&sig=obYKA6wA2TO](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=YR7vCgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=McLaren,+P.+(2015).+*Life+in+schools:+An+introduction+to+critical+pedagogy+in+the+foundations+of+education*+(6th+ed.).+Routledge.&ots=yyEtmW3Xym&sig=obYKA6wA2TO)

IjI4v2CdALPF5-4&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Makolo, J. G., Amalia, I., Prismadani, Z., Amri, U., DS, V. S., & Lendriyono, F. (2026). POST-PANDEMIC EDUCATION DIGITALIZATION AND DIGITAL DIVIDE: A STRUCTURAL SOCIOLOGY PERSPECTIVE IN INDONESIA. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 11(02), 215–223. <https://doi.org/10.23969/JP.V11I02.50090>

Mariyono, D. (2024). Indonesian mosaic: the essential need for multicultural education. *Quality Education for All*, 1(1), 301–325. <https://doi.org/10.1108/QEA-05-2024-0042>

McLaren, P., & Jandrić, P. (2020). Postdigital Dialogues on Critical Pedagogy, Liberation Theology and Information Technology. *Postdigital Dialogues on Critical Pedagogy, Liberation Theology and Information Technology*, 1–312. <https://doi.org/10.5040/9781350099982>

Mintasih, D., Sukiman, S., & Purnama, S. (2024). Integration of Digital Technology in Islamic Religious Education Learning: A Qualitative Study on Teachers' Competence and Implementation Models in Secondary Schools. *Jurnal Pendidikan Islam*, 13(1), 85–96. <https://doi.org/10.14421/JPI.2024.131.85-96>

Nurul, L., 1*, Y., Nugraha, R. A., & Fadhilah, N. A. (2026). Transformasi Pendidikan Digital dan Reproduksi Ketimpangan Sosial: Studi Empiris di Indonesia. *PERSEPTIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 4(1), 27–35. <https://doi.org/10.70716/PERSEPTIF.V4I1.458>

Ortaçtepe Hart, D. (2023). Creating Anti-Oppressive Digital Spaces for Social Justice Language Education. *TESOL Quarterly*, 57(1), 285–297. <https://doi.org/10.1002/TESQ.3180>

Pratiwi, I., & Utama, B. (2020). Kesenjangan kualitas layanan pendidikan di Indonesia pada masa darurat COVID-19: Telaah demografi atas implementasi kebijakan belajar dari rumah. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 81–86. <https://doi.org/10.14203/JKI.V0I0.539>

Reksiana, Nata, A., Rosyada, D., Rahiem, M. D. H., & Rafikjon Ugli, A. R. (2024). Digital Extension of Digital Literacy Competence for Islamic Religious Education Teachers in the Era of Digital Learning. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 21(2), 402–420. <https://doi.org/10.14421/JPAI.V21I2.9719>

Salsabila, S. S., Rohmadani, A. I., Mahmudah, S. R., Fauziyah, N., Afifah, R., & Sholihatien, N. (2022). Tantangan Pendidikan Multikultural di Indonesia di Zaman Serba Digital. *ANWARUL*, 2(1), 99–110. <https://doi.org/10.58578/ANWARUL.V2I1.309>

Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/J.JBUSRES.2019.07.039>

van de Werfhorst, H. G., Kessenich, E., & Geven, S. (2022). The digital divide in online education: Inequality in digital readiness of students and schools. *Computers and Education Open*, 3, 100100. <https://doi.org/10.1016/J.CAEO.2022.100100>